



Media Massa : **Republika**

# Pendaftaran Sekolah Negeri di Yogya Gratis

**Yulianingsih**

**M**ulai 2013 ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan setempat menggratiskan biaya pendaftaran peserta didik baru (PPDB) dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMA/SMK di Yogyakarta.

"Semua gratis tidak ada biaya pendaftaran masuk di sekolah-sekolah negeri di Yogyakarta. Biaya pendaftaran sudah dikafeter APBD 2013," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, Selasa (28/5).

PPDB Kota Yogyakarta pada 2013 ini akan dilakukan melalui sistem *real time online* (RTO). Sistem ini hanya digunakan oleh sekolah negeri saja.

Tahun lalu ada beberapa sekolah swasta yang ikut, namun tahun ini hanya dikhususkan bagi sekolah negeri. Pasalnya, berdasarkan aturan menteri keuangan yang baru tidak memungkinkan untuk menyertakan sekolah swasta di sistem yang dilalui dari APBD tersebut.

Semua sekolah negeri tingkat SMP dan SMA/SMK di Yogyakarta melakukan PPDB melalui sistem ini.

Sedangkan untuk tingkat SD ada 16 SD Negeri yang mengikuti sistem ini. 16 SD Negeri yang mengikuti sistem tersebut adalah SDN Ungaran I, Serayu, Lempuyang Wangi, Jetisharjo, Glagah, Giwangsan, dan Kotagede I.

Selain itu juga SDN Gedongkuning, Pujokusuman I, Suryodiningrat 3, Keputran A, Keputran 2, Tegalarjo I, Tegalarjo 2, Petingen, dan Bumijo.

"Dengan begitu, pendaftaran siswa bisa dilakukan dari rumah saja melalui internet sehingga mobilitas penduduk terkurangi," jelasnya.

PPDB melalui sistem RTO akan dibuka mulai 1-3 Juli 2013 untuk tingkat SMA/SMK, 8-10 Juli untuk tingkat SMP dan 27-28 Juli untuk tingkat SD. Sedangkan pengumuman penerimaan dilakukan 4 Juli untuk SMA/SMK, 11 Juli untuk SMP dan 28 Juli tingkat SD.

Masyarakat, kata Edy, tinggal mengakses website Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta [www.pendidikan@jogjakota.go.id](http://www.pendidikan@jogjakota.go.id) atau di situs [www.yogya.siap.ppdb.com](http://www.yogya.siap.ppdb.com).

Selain gratis biaya pendaftaran sekolah, tahun ini Pemkot Yogyakarta juga memberikan kuota khusus bagi siswa miskin dari keluarga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) untuk masuk ke sekolah negeri.

Rata-rata kuota bagi siswa KMS di sekolah negeri ini sebesar 25 persen dari daya tampung sekolah yang bersangkutan. Namun tahun ini, kuota bagi siswa KMS ini tidak dipukul rata untuk semua sekolah negeri sama.

"Kita gunakan pendekatan kewilayahan. Jadi kita sudah petakan, di mana tempat tinggal siswa-siswa kelompok ini. Mereka kita anjurkan untuk masuk sekolah negeri terdekat, sehingga kuota bagi sekolah negeri satu dengan lainnya berbeda," kata Edy.

Menurutnya, ada satu atau dua sekolah negeri yang siswa KMS-nya mencapai 30 hingga 50 persen dari daya tampung. Tetapi, kata dia, ada yang cuma 10 persen saja. Ini dilakukan karena pendekatan kewilayahan tersebut.

Pihaknya kata Edy, dengan pendekatan kewilayahan ini maka siswa tidak akan kejauhan saat berangkat sekolah. Jika mereka diterima di sekolah yang jauh dari rumah maka siswa tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan. "Dan ini memberatkan, makanya

**- Din. pendidikan**  
**- Dintarnakertrans**  
**- UPT JPD**  
**Positif**  
**Sejera**  
**Untuk diketahui**

kita gunakan pendekatan kewilayahan," katanya.

Biaya pendidikan bagi siswa pemegang KMS ini ditanggung sepenuhnya melalui Jaminan Pendidikan daerah (JPD).

Berdasarkan pemetaan kewilayahan itu, maka kuota siswa pemegang KMS di SMP dan

**Tabel 1:**

Nama Sekolah	Daya Tampung	Kuota Siswa KMS
1. SMPN 1	264 siswa	36 siswa
2. SMPN 2	232 siswa	36 siswa
3. SMPN 3	204 siswa	70 siswa
4. SMPN 4	170 siswa	60 siswa
5. SMPN 5	320 siswa	25 siswa
6. SMPN 6	238 siswa	60 siswa
7. SMPN 7	204 siswa	60 siswa
8. SMPN 8	320 siswa	25 siswa
9. SMPN 9	204 siswa	26 siswa
10. SMPN 10	170 siswa	64 siswa
11. SMPN 11	136 siswa	68 siswa
12. SMPN 12	170 siswa	50 siswa
13. SMPN 13	102 siswa	45 siswa
14. SMPN 14	136 siswa	40 siswa
15. SMPN 15	340 siswa	134 siswa
16. SMPN 16	238 siswa	64 siswa

SMA/SMK negeri berbeda-beda. Sedangkan untuk tingkat SD tidak ada pembagian khusus terkait kuota KMS ini.

Pembagian kuota bagi siswa miskin di sekolah negeri tingkat SMP di Yogyakarta dapat dilihat di Tabel 1.

Sedangkan kuota siswa miskin tingkat SMA/SMK juga dilakukan melalui pendekatan kewilayahan. Sekolah negeri yang sekitarnya memiliki siswa pemegang KMS terbanyak akan memperoleh kuota KMS paling banyak dan sebaliknya. Untuk tingkat SMK juga ditambahkan pertimbangan keminatan terhadap jurusan di sekolah tersebut.

Daftar kuota KMS untuk tingkat SMA/SMK Negeri di Yogyakarta dapat dilihat di Tabel 2.

Pembagian kuota KMS berdasarkan kewilayahan ini, menurut Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, dilakukan untuk memastikan seluruh siswa usia sekolah di kota ini mendapatkan layanan pendidikan hingga tingkat SMA. "Yang jelas tidak ada alasan bagi siswa usia sekolah di Yogyakarta untuk

**Tabel 2:**

Nama Sekolah	Daya Tampung	Kuota Siswa KMS
1. SMAN 1	288 siswa	8 siswa
2. SMAN 2	288 siswa	9 siswa
3. SMAN 3	224 siswa	7 siswa
4. SMAN 4	192 siswa	12 siswa
5. SMAN 5	256 siswa	13 siswa
6. SMAN 6	256 siswa	14 siswa
7. SMAN 7	256 siswa	18 siswa
8. SMAN 8	256 siswa	9 siswa
9. SMAN 9	192 siswa	11 siswa
10. SMAN 10	160 siswa	12 siswa
11. SMAN 11	288 siswa	20 siswa
1. SMKN 1	192 siswa	48 siswa
2. SMKN 2	736 siswa	184 siswa
3. SMKN 3	640 siswa	160 siswa
4. SMKN 4	544 siswa	136 siswa
5. SMKN 5	448 siswa	112 siswa
6. SMKN 6	416 siswa	104 siswa
7. SMKN 7	256 siswa	64 siswa

tidak sekolah," ujarnya.

Kota Yogyakarta, kata dia, sudah cukup lama mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Karenanya, pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal agar semua siswa usia sekolah wajib belajar 12 tahun tertampung di sekolah-sekolah di kota tersebut.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. UPT. JPD	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005